BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, serta suatu tindak pidana yang membutuhkan *extra ordinary law enforcement* untuk memberantasnya. Korupsi ditinjau dari sudut apapun, seperti sosial, budaya serta hukum, apalagi agama merupakan suatu perbuatan tercela yang harus diberantas hingga akarnya, karena memberikan suatu penderitaan pada banyak orang.

Tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan kerugian terhadap perekonomian negara. Korupsi yang marak dilakukan pada suatu negara akan menyebabkan kemunduran daya saing negara, yang pada akhirnya juga menurunkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.¹ Frans Magnis Suseno menjelaskan, bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada hal yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Kemiskinan dan ketimpangan sosial akan semakin tinggi, lalu memicu terjadi tindak pidana lainnya.

Data menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index (CPI)* Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 stagnan dengan skor 37. Sementara itu, pada tahun 2018 naik satu poin menjadi 38, lalu skor *CPI* Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi

¹Cegah Korupsi, *Fakta Korupsi*, 2015, dapat diakses pada <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi/2-uncategorised> diakses pada 3 September 2020 Pukul 22.00 WIB.

²R.Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 3.

85 dari 180 negara. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia (TII)*. Maka dapat dikatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi “Rentan Korup”.³

Status Indonesia yang “Rentan Korup” didapat karena masih maraknya korupsi di Indonesia. Berdasarkan fakta dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, maka terdapat persenan yang cukup tinggi untuk beberapa jenis korupsi, yaitu penyelewengan anggaran (75%), keberadaan calo (99%), suap dalam lelang jabatan (63%), gratifikasi (91%).⁴ Hasil survei tersebut telah menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat ini, serta banyaknya kerugian keuangan negara yang didapati. Pada tahun 2018 kerugian keuangan negara akibat korupsi yaitu sebesar Rp.9,2 Triliun.⁵ Banyaknya kerugian negara oleh kasus korupsi namun yang mendapatkan status koruptor sangat sedikit jumlahnya. Sehingga Azhar menyatakan bahwa korupsi merupakan penyakit sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan manusia.⁶

Kasus korupsi sudah terjadi hampir di semua kalangan pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat Desa. Meski termasuk dalam himpunan yang kecil, namun pemerintahan Desa berpeluang untuk melakukan tindak pidana

³KPK, *Indek Persepsi Korupsi Indonesia Membaik*, 24 Januari 2020. Dapat diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik> Diakses pada Rabu, 24 Juni 2020, Pukul 21:47 WIB.

⁴KPK, *Laporan Tahunan KPK 2019*. Dapat diakses pada <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf> Diakses pada Senin, 06 Juli 2020, Pukul 16:53 WIB

⁵Kompas.com, Dylan Apriando Rahchman, *ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi pada 2018 mencapai 9,2 Triliun*, 28 April 2020. Dapat diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> Diakses pada Selasa, 07 Juli 2020, Pukul: 19:43

⁶Azhar, *Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam*, Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009, hlm. 160.

korupsi dana Desa maupun kegiatan-kegiatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Pada tahun 2017, 900 kepala Desa dari 74.000 Desa yang menerima dana Desa, ditangkap karena menyalahgunakan dana Desa.⁷ Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan Desa justru dikorupsi oleh aparat Desa. Masih banyak lagi kepala Desa yang belum tersentuh hukum, pencegahan yang konsisten dan agresif penting untuk digagas.

Terkait keberadaan Desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai Desa dan Desa Adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁸ Kesempatan yang diberikan oleh negara kepada Desa memiliki banyak manfaat yang berguna untuk meningkatkan pembangunan di Desa. Namun wewenang tersebut jika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum justru akan mempersulit aparat Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa, serta memberikan kerugian pada warga Desa. Padahal Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum masyarakat modern terbentuk, kelompok sejenis

⁷Tempo.co, *Fakta atau Hoax, Benarkah 900 Kades Terjerat Kasus Korupsi Dana Desa?*, 29 Januari 2019. Dapat diakses pada <https://cekfakta.tempo.co/fakta/115> Diakses pada Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul 22:25

⁸Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Skripsi Universitas Hasanudin Makasar 2016*. hlm. 17.

Desa atau masyarakat adat, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.⁹ Karena peranan penting Desa tersebut maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai pada Desa atau Nagari.

Salah satu dugaan penyebab gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sistem hukum pemberantasan korupsi itu sendiri, khususnya substansi hukumnya. Banyaknya regulasi yang diharapkan untuk meredam tindak pidana korupsi, nyatanya belum maksimal menekan angka tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya yang mendalam sebelum melakukan suatu pemberantasan dan upaya pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, karena hukum yang dianggap ideal oleh legislatif nyatanya dalam praktik sosial kehidupan sehari-hari mengalami krisis yang tajam.

Pemerintah Indonesia menunjukkan usaha dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui legislatif untuk membentuk suatu regulasi pemberantasan dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan korupsi di tanah air merupakan suatu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai wujud komitmen terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi, maka pemerintah telah merencanakan berbagai upaya dan model pemberantasan korupsi dari masa ke masa, hal tersebut dapat dilihat dari silang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁰

⁹Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurna)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014), hlm. 361.

¹⁰Zainal Arifin Mochtar, *Menegakkan Konstitusi Melawan Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2008), hlm. 3.

Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut, kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/ 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹ Pada Perkembangan terakhir lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Substansi hukum di Indonesia dalam pencegahan tindak pidana korupsi belum mempertimbangkan sistem hukum pidana adat sebagai hukum asli Indonesia. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi terdapat beberapa undang-undang yang memuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹¹Anti Corruption Clearing Hous, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dapat diakses pada <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> Diakses pada Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 21:59 WIB.

Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta undang-undang lain yang di dalamnya memuat ketentuan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sama sekali belum menggunakan pendekatan hukum pidana adat.

Seyogyanya hukum pidana adat dapat digunakan sebagai bahan penyusunan ketentuan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Ermansjah Djaja, untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi, maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.¹² Upaya pencegahan akan sangat baik apabila disesuaikan dengan *Legal Culture* masyarakat Indonesia yang beragam.

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan dihormati oleh masyarakat daerah adat. Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³ Hukum pidana adat memiliki sanksi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis masyarakat.¹⁴ Serta

¹²Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

¹³I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013), hlm. 7.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Bahan Kuliah Teori Ilmu Hukum*, (UNDIP: Program Doktor Ilmu Hukum, 2005), hlm. 151.

lebih mengutamakan sanksi moral yang membuat hukum pidana adat lebih disegani, lalu masyarakat adat sebisa mungkin menghindari hal-hal yang telah dilarang oleh hukum pidana adat.

Pada Provinsi Sumatera Barat kasus tindak pidana korupsi terjadi dengan jumlah yang relatif tinggi. Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi yang melibatkan puluhan Anggota DPRD Sumatera Barat terkait APBD Sumbar pada tahun 2002 senilai Rp 5,9 miliar. Akibatnya, 40 anggota DPRD Sumbar divonis 2 tahun penjara dan denda Rp.100 juta subsider 2 bulan penjara.¹⁵ Pada tahun 2012 terdapat kasus korupsi pada sektor infrastruktur sebanyak 39 Kasus, bantuan sosial atau sosial masyarakat sebanyak 23 kasus, kemudian menyusul sektor keuangan sebanyak 22 Kasus.¹⁶ Lalu pada tahun 2019, sembilan orang ASN dipecat karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada sejumlah organisasi perangkat Desa.¹⁷

Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan kearifan lokalnya, hukum pidana adat yang ada pada Provinsi Sumatera Barat masih diakui dan masih digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana adat. Salah satu daerah adat atau yang selanjutnya akan disebut dengan Nagari, pada Provinsi Sumatera Barat, melakukan suatu pembaharuan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada Nagari Situjuh Batua, Kabupaten Limapuluh Kota berbasis

¹⁵Liputan 6, Lina Crishna Yulika, *17 Mei 2004, Korupsi Berjamaah 40 Anggota DPRD Sumbar Berujung Vonis 2 Tahun Bui*, 17 Mei 2019. Dapat diakses pada <https://www.liputan6.com/news/read/3967623/17-mei-2004-korupsi-berjamaah-40-anggota-dprd-sumbar-berujung-vonis-2-tahun-bui> Diakses pada Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul: 12:37 WIB

¹⁶Republika.co.id, Heri Rusian, *Ini Kabupaten Terbanyak Kasus Korupsi di Sumatera Barat*, 11 Desember 2012. Dapat diakses pada <https://republika.co.id/berita/meu75c/ini-kabupaten-terbanyak-kasus-korupsi-di-sumatera-barat> Diakses pada Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul:12:41 WIB

¹⁷Kompas.com, Perdana Putra, *Korupsi 9 ASN di Sumbar dipecat*, 11 Juni 2019. Dapat diakses pada <https://regional.kompas.com/read/2019/06/11/16011891/korupsi-9-asn-di-sumbar-dipecat> Diakses pada Jum'at, 17 Juli 2020, Pukul: 12:58

hukum pidana adat, yaitu Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Nagari Situjuh Batua mengklaim peraturan terkait pencegahan korupsi melalui pendekatan hukum pidana adat yang telah dibentuk sebagai yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari, diharapkan mampu mencegah tindak pidana korupsi pada Nagari Situjuh Batua, serta merupakan wujud partisipasi Nagari Situjuh Batua dalam memerangi tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*.

Keberadaan dari Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari merupakan suatu pembaharuan hukum pidana dalam bidang hukum pidana adat. Kedudukan dari Peraturan Nagari tersebut perlu untuk diperjelas dan dianalisis lebih dalam berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena Peraturan Nagari tersebut diklaim sebagai peraturan pertama dan satu-satu di Indonesia yang memasukan hukum pidana adat (sanksi adat) dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka perlu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari ditinjau dari konteks hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan tersebut, penelitian ini akan mengkaji upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Nagari Situjuh Batua dengan menggunakan pendekatan hukum pidana adat sebagai terdapat

dalam Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERATURAN NAGARI NOMOR 8 TAHUN 2019 DI NAGARI SITUJUAH BATUA KECAMATAN SITUJUAH LIMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari dalam konteks hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pencegahan korupsi beserta tata cara penegakan hukum dalam Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari?
3. Apakah bentuk sanksi adat yang ada di dalam Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari pada Nagari Situjuh Batua dalam konteks Hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur pencegahan korupsi beserta tata cara penegakan hukum dalam Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari pada Nagari Situjuh Batua.
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat yang ada dalam Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya peneliti, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana.
 - b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang Hukum Pidana, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Adat.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan sumbangan solusi kepada aparat penegak hukum terutama dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai dasar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pendekatan Hukum Pidana Adat.
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum Pidana Adat, khususnya mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁸ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true*

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

answer) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁹ Serta yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk mengungkapkan suatu permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, maka diperlukannya suatu metode penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁰ Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada norma hukum dan akan ditunjang dengan hasil wawancara. Selain itu juga didasarkan pada sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif untuk menentukan kesesuaian dengan asas-asas hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran serta mendeskripsikan prosedur beserta tata cara penegakan hukum terkait dengan pencegahan korupsi dalam Peraturan Nagari Situjuh Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan terkait sanksi pidana adat apa saja yang ada pada Peraturan Nagari tersebut. Lalu penelitian ini juga berupaya

¹⁹Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto sebagaimana dikutip dalam bukunya Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.18.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 118.

untuk mencari fakta serta mencari solusi dari permasalahan hukum bagaimanakah kedudukan Peraturan Nagari tersebut dalam konteks hukum Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis-normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yaitu Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Menurut I Made Pasek Diantha, pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa hukum tertulis dan tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.²¹ Penelitian ini juga ingin melihat perkembangan hukum tindak pidana korupsi Indonesia sebagai tindak pidana khusus yang merupakan *Extraordinary Crime*, serta akan melihat penerapan sanksi pidana adat pada Nagari Situjuh Batua pada masa lalu.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 160.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari Wali Nagari Situjuah Batua, Don Veski.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.²²

Berikut adalah bahan hukum primer yang diperlukan oleh peneliti yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm.52.

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
- h) Peraturan Nagari Situjuh Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari;
- i) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai contoh kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁴ Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan peneliti, yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Sumber Bahan Hukum

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumbar, dan Perpustakaan pribadi.²⁵

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dalam pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada informan yaitu Wali Nagari Situjuah Batua yang memahami betul terkait Hukum Pidana Adat pada Nagarnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun data-data hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat pada Kantor Wali Nagari serta daerah Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Semua bahan hukum yang peneliti dapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan

²⁵Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafay, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers,2018), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 217.

²⁶ Soejono Soekanto, 2010, *Op.Cit.* hlm. 66.

kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Ada dua cara yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.²⁷ Analisis kualitatif adalah uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi lebih didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para ahli tentang objek yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan penilaian-penilaian peneliti terhadap data berupa angka-angka. Selain itu, analisis kuantitatif juga membutuhkan populasi dan sampel dalam pengumpulan data untuk dianalisis.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti cenderung akan menggunakan analisis kualitatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut I Made Pasek Diantha, ada empat macam teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.²⁹ Pada kesempatan ini peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁷*Ibid.* hlm.21.

²⁸*Ibid.* hlm.68.

²⁹Zainudin Ali, 2014, *Op.Cit.* hlm.98.

a. Teknik Deskriptif

Dengan teknik deskriptif, peneliti ingin memaparkan adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa atau kondisi hukum yang dimaksud adalah terkait dengan kedudukan dari sebuah Peraturan Nagari Situjuh Batua terkait dengan pencegahan korupsi yang memuat sanksi adat dalam konteks hukum Indonesia.

b. Teknik Komparatif

Setelah peneliti mendeskripsikan peristiwa hukum atau kondisi hukum yang ada, selanjutnya peneliti akan memperbandingkan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli mengenai objek penelitian yang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut akan diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang sedang diteliti.

c. Teknik Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam melakukan komparasi, akan diperoleh pandangan pro dan kontra. Terhadap pandangan tersebut, peneliti akan mengevaluasinya dengan kemungkinan hasil peneliti akan pro atau kontra dengan pandangan yang ada, atau tidak menyetujui kedua pandangan yang ada.

d. Teknik Argumentatif

Setelah dilakukan evaluasi, peneliti akan memberikan argumentasi akhir. Dalam argumentasi tersebut, akan ada penalaran atau reasoning atau penjelasan yang masuk akal dari peneliti tentang objek yang diteliti.